
PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Evania Alberta Heryanto
niaeva50@gmail.com

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Aplikasi SIPKD dengan jenis Core System terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan untuk mengetahui tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau berdasarkan Pemanfaatan Aplikasi SIPKD. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi terstruktur terhadap laporan keuangan tahunan periode 2015 sampai dengan 2019 serta menggunakan angket yang diisi langsung oleh responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30 responden yang terdiri dari user atau operator aplikasi SIPKD pada SKPD pemerintah Kabupaten Sekadau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Pembahasan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, uji t dan koefisien determinasi. Pengujian model penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang memiliki pengaruh sebesar 21,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 78,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Kata Kunci: Pemanfaatan Aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) secara sadar atau tidak sadar mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga memberikan berbagai manfaat dan kemudahan, baik untuk organisasi pemerintah maupun untuk kegiatan berbisnis bagi para organisasi swasta atau perusahaan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang biasanya disingkat dengan SIPKD. SIPKD merupakan seperangkat aplikasi yang tersistem dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas implementasi dari berbagai bidang yang mengelola keuangan daerah didasarkan pada tingkat ekonomis, terbuka, efektif, efisiensi, auditabel serta akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dijelaskan bahwa persyaratan normatif laporan keuangan, salah satunya adalah karakteristik kualitatif dari

laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan digunakan sebagai patokan pengambilan sebuah keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang mendorong tingkat kualitas suatu nilai informasi yang dituangkan di dalamnya sehingga para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna atau pemakainya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan tersebut dapat dipahami, tidak menyesatkan, serta dapat memenuhi segala kebutuhan para pemakainya dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Sekadau sudah menerapkan pemanfaatan aplikasi SIPKD sejak tahun 2011.

KAJIAN TEORITIS

Pesatnya perkembangan teknologi pada era globalisasi seperti saat ini menuntut pemerintah untuk dapat memanfaatkan hal tersebut demi mempermudah pekerjaannya dalam berbagai bidang. Salah satu perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan teknologi informasi dan hal ini banyak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai macam transaksi dan laporan keuangannya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang biasa disingkat dengan SIPKD.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari rancangan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran dengan pedoman undang-undang yang berlaku. Aplikasi ini dapat menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah, dan data keuangan yang utama terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah. Secara umum SIPKD meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus, dimana informasi umum adalah informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sedangkan untuk

informasi khusus hanya dapat diakses atau disediakan untuk pengambil kebijakan khusus.

Secara substansial aplikasi SIPKD dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang terdiri dari *core system* dan *non core system*, yang mana *core system* menjadi fokus dari penelitian ini. *Core system* merupakan modul aplikasi inti dari SIPKD, yang mana mencakup modul penyusunan anggaran, penatalaksanaan anggaran, penyusunan pertanggung jawaban dan penyusunan anggaran perubahan. Di sisi lain, *non core system* merupakan modul pendukung lainnya dari aplikasi SIPKD seperti pencatatan gaji.

Berikut ini merupakan bagian atau modul dari aplikasi SIPKD *core system* sebagai berikut:

1. Modul Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Modul ini merupakan serangkaian bagian dari aplikasi yang disiapkan untuk membantu proses penyusunan dokumen-dokumen anggaran. Modul ini menggambarkan tahap-tahap penyusunan anggaran, pengesahan dan penetapan APBD yaitu pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta penetapan APBD sebagai tahapan akhir yang kemudian menjadi sumber data untuk penyiapan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Modul Penyusunan Pelaksanaan Anggaran

Modul aplikasi ini menyertakan menu ataupun fasilitas yang dapat membantu SKPD atau bendahara penerimaan maupun pengeluaran untuk dapat menatausahakan penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Alur dari proses modul di sini adalah proses percetakan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) - Peraturan Daerah (Perda) dan modul ini dilengkapi dengan transfer data rencana kegiatan sehingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak perlu melakukan input ulang jika sudah pernah melakukan input data.

3. Modul Penyusunan Pertanggungjawaban

Modul aplikasi yang membantu pemerintah daerah untuk membantu mempersiapkan laporan keuangan, mulai dari Jurnal sampai dengan Buku Besar kemudian membuat Neraca Saldo. Berdasarkan Neraca Saldo, laporan keuangan

dapat terdiri dari laporan realisasi anggaran, Neraca dan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Modul Penyusunan Perubahan Anggaran

Menurut Penmendagri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mengamanatkan adanya desentralisasi tanggung jawab kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan *ouput* yang dihasilkan dari modul ini berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, Neraca, laporan SAL, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Pemanfaatan aplikasi SIPKD ini merupakan salah satu upaya pemerintah membantu dan meminimalisir kesalahan pengelolaan laporan keuangan daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan Undang-undang yang telah diterapkan dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan informasi keuangan.

Aplikasi SIPKD telah didesain sedemikian rupa agar fungsinya sesuai dengan tujuan pemerintah pusat. Salah satu tujuan pemerintah pusat menciptakan dan menerapkan aplikasi ini di antaranya adalah merealisasikan upaya pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional dengan tingkat keakuratan yang maksimal dan lebih efisien dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Maulana (2016: 153): Ada beberapa fungsi dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengolahan data keuangan daerah (penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban) selanjutnya menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat, kemudian menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, serta menyajikan informasi yang akurat. Informasi yang akurat dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.

Menurut Dewi (2014: 443): Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi tercapainya suatu akuntabilitas. Dengan adanya

penerapan aplikasi SIPKD maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan agar mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dan Yusuf (2019) menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Semakin tinggi penerapan aplikasi SIPKD semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan berbagai informasi catatan keuangan selama periode tertentu. Pemerintah daerah merupakan salah satu penyedia laporan keuangan dan hal ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Keuangan Daerah. Menurut Khusaini (2018: 2): Tujuan dari diaturnya keuangan daerah oleh sektor pemerintahan adalah upaya peningkatan efisiensi, efektivitas untuk pengelolaan tenaga kerja atau operator keuangan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan.

Laporan keuangan yang dimanfaatkan oleh kalangan tertentu sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentu saja harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan lebih akurat dan *akuntable*. Menurut Adiputra (2018: 294): Kualitas laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerjanya selama periode tertentu dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan perusahaan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diungkapkan sesuai dengan fakta tanpa adanya sebuah rekayasa dalam laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang dapat memudahkan para pengguna dalam memperoleh suatu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Kawatu (2019: 25): Pemerintahan daerah diharapkan terus berusaha meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah bernilai dan berkualitas jika mampu memenuhi ciri-ciri: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang baik juga memiliki ciri lain yaitu tidak memihak pada pihak manapun dan menyajikan data keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya rekayasa dalam laporan keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi terstruktur terhadap laporan keuangan tahunan periode 2015 sampai dengan 2019, serta menyebarkan angket (kuesioner) yang diisi langsung oleh responden. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 *user* atau operator aplikasi SIPKD unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Sekadau. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan alat bantu berupa *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 25.

PEMBAHASAN

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Shapiro wilk*. Suatu data dikatakan normal apabila *p value* (sig.) > 0,05.

TABEL 1
TEST OF NORMALITY

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.198	30	.704	.836	30	.210

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh nilai sig 0,210 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi perbedaan *variance* residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap atau sama, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya apabila berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan syarat nilai sig > 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Berikut disajikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

TABEL 2
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	58.891	2.504		23.518	.000
X	-.460	.570	-.151	-.807	.426

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diperoleh nilai sig 0,426 > 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2) Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut disajikan uji regresi linear sederhana yaitu:

TABEL 3
UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	58.891	2.504		23.518	.000
X	2.492	.570	4.551	3.114	.004

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai Constant (a) sebesar 58,891. Di sisi lain, nilai koefisien regresi (b) adalah sebesar 2,492 sehingga persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 58,891 + 2,492X$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 58,891 yang berarti bahwa nilai koefisien variabel dependen adalah 58,891. Di sisi lain, koefisien regresi variabel independen sebesar 2,492 yang berarti bahwa setiap ada penambahan 1 persen nilai dependen, maka nilai variabel independen juga

bertambah sebesar 2,492. Hasil koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif.

3) Pengujian Hipotesis

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Uji t sering disebut dengan uji parsial. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima.

Berikut disajikan hasil uji t yaitu:

TABEL 4
UJI t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.891	2.504		23.518	.000
	X	2.492	.570	4.551	3.114	.004

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,114 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Berdasarkan nilai signifikansi (sig) yaitu $0,04 < 0,05$ dan berdasarkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu $3,114 > 2,0481$, maka dapat diketahui bahwa pada penelitian ini hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

4) Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara angka 0 – 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati satu, artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel dependen. Di sisi lain, jika nilai koefisien determinasi mendekati nol artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap variabel dependen.

Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi yaitu:

TABEL 5
KOEFISIEN DETERMINASI (R SQUARE)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.459 ^a	.211	.168	4.07652

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,211 atau 21,1 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh sebesar 21,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 78,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan parameter NICE, maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sekadau dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dikatakan cukup.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang memiliki pengaruh sebesar 21,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 78,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menggunakan Paramater NICE, maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau selama tahun 2015-2019 dikatakan cukup.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pemerintah daerah untuk terus menerus meningkatkan kualitas laporan keuangan dari skala cukup menjadi skala baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I Made, Pradana., Sidharta U., Silvia, Veronica NP, S. 2018. "Kualitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal, Terhadap Efisiensi Investasi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, no. 3, pp. 293-312.

-
- Anshori, Muslich., Sri, Iswati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ansofino. et al. 2012. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asriel, Armida S. 2016. *Manajemen Kantor*. Jakarta: Kencana.
- Dedeh, Maryani., Ruth, Roselin., Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dewi, Ratna AP., dan Putu Sri, HM. 2014. "Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kualitas Laporan Keuangan" *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* " Pp. 442-457.
- Fatkhan. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keprilaku Individu Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Organisasi" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, no. 3, pp. 394-401.
- Forum Studi Keuangan Negara. 2017. *Esai Keuangan Negara*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Harefa, Mandala et al. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kawatu, Freddy S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Sleman: CV Budi Utama.
- Kushaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Nagara, Dean S., Sri, Mulyani. 2019. "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter NiCE" *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, Vol. 3, no. 2, pp. 135-146.
- Payadnya, I Putu, AA., I Gusti, Agung, TJ. 2018. *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riyanto, Slamet., Aglis A. Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Santoso, Singgih. 2019. *Mahir Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Sugeng. 2019. *Kajian Survey Kepuasan layanan Publik dan Kebijakan Pemerintah, Daerah Propinsi Bengkulu Dalam Bidang Kesehatan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suprihanto, John. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syahdi, Muhammad Z. 2018. "Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah" *Jurnal ilmu Ekonomi*, Vol. 1, no. 1, pp. 100.

Wagiran. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Yusuf, Maulana. 2016. “Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*, Vol. 10, no. 2, pp. 149-160.

